

PENGEMBANGAN UNIT PRODUKSI SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SMK

Oleh : Bada Haryadi *)

ABSTRACT

The programs of vocational secondary school (SMK) are derived from the real requirement of employment. Serious attentions for production unit management are needed in realizing such program and so are the participations of industrial and business. Production unit of vocational vocational secondary school is a business process conducted in school, which is profit oriented in nature and the school members act as a player, optimizing resources of schools and its surroundings, into variety business unit suitable to its capabilities and is managed professionally.

By the professionalism of increasing production unit, there are chances to improve the quality of vocational secondary school high school, educationally, economically, or socially. In term of education, students may improve their knowledge, skills, organizing capabilities of business, practicing disciplines and initiative, adding the study intensity, and be able to follow the science and technological advancement; in term of economics, increasing the income and welfare, encourage decision taken upon economics consideration, increasing school's income for being

*) *Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta*

more independent, increasing sources of facility maintenance cost, and increasing sources of school's operational cost; in term of social, increasing the sense of togetherness and responsibilities among all the school members in performing learning program, encourage business spirits to improve welfare, socializing school into the community, business society, upon education operation, graduation, and business product.

For production unit to run well, there are needed of: (1) transparency, by which the participant will be attracted in production unit activities. Transparency of financial in particular may lead to an honest behavior, admiration, and good examples; (2) fair in distribution and working process by which all participant may also be attracted in production unit activities; (3) power sharing, by which the working process should be accelerated by the hand of expert; (4) risk taking, which is a consequence of performing production unit. Management may terminate the program when the risk is considered too much. To develop production unit that lead to fill the requirement as complementary institution in field practice of SMK students, its existence should be developed by feasibility study and SWOT analyses.

Key Word: The developing of school production improves the vocational secondary school quality

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan dan memperluas bidang pendidikan keahlian yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Pengembangan bidang pendidikan keahlian dapat dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan tenaga kerja sehingga

terbentuk tenaga kerja profesional, mandiri dan beretos kerja tinggi yang pada akhirnya akan mampu mengisi, mencipta, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Kendala yang sering dihadapi dalam program ini adalah belum sepenuhnya mengacu kepada pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja, baik jumlah maupun mutunya.

Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diturunkan dari kebutuhan nyata pasar kerja. Untuk dapat merealisasikan program ini peran serta dunia industri dan dunia usaha serta pengelolaan Unit Produksi (UP) di sekolah perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. SMK sebenarnya mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang tidak kalah dengan dunia kerja sehingga merupakan investasi yang harus diperhitungkan dan merupakan sumber usaha dalam bidang jasa dan produksi yang selanjutnya dikenal dengan UP. Pengembangan usaha di sekolah dimaksudkan selain untuk menambah penghasilan sekolah, juga untuk memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata kepada para siswa.

UP adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan di dalam sekolah yang bersifat bisnis (*profit oriented*) dengan para pelaku warga sekolah dengan mengoptimalkan sumber daya sekolah dan lingkungan, dalam berbagai bentuk unit usaha sesuai dengan kemampuan yang dikelola secara profesional (Pakpahan, 1997: 7). Secara umum disebutkan bahwa UP sebagai suatu usaha adalah suatu aktivitas yang berkesinambungan dalam mengelola sumber daya sekolah untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan.

Banyak model-model kejuruan lainnya seperti *cooperative education*, *interenship program*, *clinical experience*, serta *work experience* yang kesemuanya bermuara pada pendidikan kejuruan berbasis pengalaman kerja. Seperti halnya, pengalaman Jerman dan negara-negara maju lainnya telah lama mempraktekkan sistem pendidikan seperti ini.

TUJUAN UNIT PRODUKSI

Tujuan diselenggarakannya UP di sekolah antara lain (1) untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam berbagai segi terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan; (2) membantu pendanaan pemeliharaan, penambahan fasilitas dan biaya-biaya pendidikan lainnya; (3) menambah semangat kebersamaan; (4) mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri dalam pelaksanaan kegiatan praktek; (5) melatih keberanian mengambil resiko yang diperhitungkan; (6) mendukung pelaksanaan dan pencapaian pendidikan sekolah seutuhnya; (7) memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk mengerjakan pekerjaan praktek yang berorientasi pasar; (8) menumbuhkan sikap profesional produktif pada siswa dan guru; dan (9) melatih siswa untuk tidak tergantung pada orang lain, dan yang tidak kalah penting adalah menjalin hubungan yang lebih baik dengan dunia usaha/ industri atau masyarakat lain atas hasil-hasil produksinya (Pakpahan, 1997: 7).

Fungsi UP sebagai usaha adalah: (1) membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran usaha sekolah pada bidang usaha apa saja sebagai peluang, pasar mana saja yang akan dilayani, skala usaha, permodalan, kriteria karyawan dan cara pengawasan dan pengendaliannya; (2) mencari dan menciptakan berbagai cara baru, terobosan baru dalam mendapatkan order/masukan, kerja sama dengan usaha lain, serta mengolah bahan (*input*) menjadi barang atau jasa (*output*) yang menarik dan memasarkannya untuk memuaskan langganan dan sekaligus memperoleh keuntungan bagi sekolah dan warga sekolah, baik secara educatif, ekonomi maupun sosial; (3) mengenali lingkungan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha serta untuk memanfaatkan dan sekaligus mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi sekolah dan warga sekolah; dan (4) sebagai pengembangan usaha yang memungkinkan dapat menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik, bermanfaat, dan melakukan pengembangan modal, manusia, sarana dan teknologi di sekolah.

Sebagai pengembangan usaha, UP di sekolah/Jurusan akan memetik manfaat, baik secara edukatif, ekonomis maupun sosial. Manfaat edukatif antara lain dapat (1) meningkatkan pengetahuan siswa/guru; (2) meningkatkan keterampilan siswa/guru; (3) meningkatkan kemampuan berorganisasi dalam bidang usaha; (4) melatih disiplin dan inisiatif; (5) melatih siswa memberikan jasa pelajanan, (6) menambah intensitas belajar siswa; (7) melaksanakan PBM agar lebih baik, dan (8) mengikuti perkembangan IPTEK.

Adapun manfaat ekonomis antara lain (1) meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi siswa, guru, dan karyawan; (2) meningkatkan keberanian mengambil sikap berusaha yang diperhitungkan secara ekonomis; (3) meningkatkan pendapatan sekolah menuju ke arah mandiri; dan (4) menambah sumber biaya perawatan fasilitas sekolah dan menambah sumber biaya operasional pendidikan (praktik). Sementara itu, manfaat sosialnya antara lain (1) dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar warga sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan; (2) dapat menumbuhkan semangat usaha bersama antar warga sekolah untuk meningkatkan hidupnya; (3) dapat mensosialisasikan sekolah dengan masyarakat umum, dunia usaha, lembaga, baik mengenai operasional pendidikan, tamatan yang dihasilkan dan produk usaha yang dihasilkan (Sukardi, 1991: 6-8).

PENDEKATAN PENGELOLAAN UNIT PRODUKSI

Keberhasilan dari UP ditentukan oleh manajemen yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Manajemen itu sendiri cukup banyak ragamnya. Secara sederhana pola yang dipakai harus mempertimbangkan (1) jenis usaha/kegiatan yang dilaksanakan UP baik jasa atau barang; (2) sumber daya yang tersedia/ disediakan dan fasilitasnya; (3) struktur pengelola UP; dan (4) kondisi situasi yang dihadapi. Untuk mencapai kearah situasi yang terpadu harus ditentukan oleh faktor yang paling mendukung di sekolah yaitu sumber daya

manusia, fasilitas, dan modal. Mekanisme kerja dan organisasi UP sekolah mempunyai kaitan erat sebagai pendukung. Organisasi UP hanya bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah sebagai Komisaris. Mengingat bidang usaha yang dikelola, maka program kerja harus berisikan personil, fasilitas, modal awal yang harus disiapkan, *cash flow* dari rencana anggaran, laba/rugi yang akan dicapai dan strategi pemasaran.

Sumber daya manusia yang dapat disediakan oleh sekolah adalah guru, karyawan dan siswa. Hal ini merupakan modal dasar yang harus dikondisikan melalui (1) inventarisasi jenis keahlian yang ada berdasarkan jenjang pengalasan dan pendidikan; (2) bakat, minat sebagai dasar untuk dikembangkan kearah produktif; (3) kerja sama, karena proses produksi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling mendukung; serta (4) bekerjasama dengan dunia kerja, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Faktor di atas pada hakekatnya didukung pula dengan pemilihan jenis usaha yang melihat ke arah kemampuan dari fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik (1) fasilitas sekolah perlu dikaji, (2) hitungan seluruh fasilitas berdasarkan jenis, ukuran; dan daya guna, (3) hitungan dan rincian dengan jelas kapasitas produksi yang bisa dicapai, (4) semua fasilitas yang digunakan hanya untuk kegiatan produksi yang melibatkan guru, siswa dan bukan untuk disewakan, maupun (5) perencanaan *work shop* UP yang khusus sehingga semua kegiatan tidak akan saling mengganggu antara proses produksi dengan proses belajar mengajar.

Dalam hal biaya atau modal di sekolah harus digali dan dikembangkan melalui berbagai usaha di antaranya apa yang sudah terprogram. Pemakaian biaya yang sudah tersedia, hendaknya memperhitungkan keuntungan atau laba, yang dapat mengurangi alokasi dana dari DIP, serta anggaran rutin sekolah. Walaupun demikian, tanpa mengorbankan informasi UP kepada guru/karyawan agar menanam saham dan dari

uang muka, disesuaikan dengan order produksi yang besarnya senilai dengan order yang diterima.

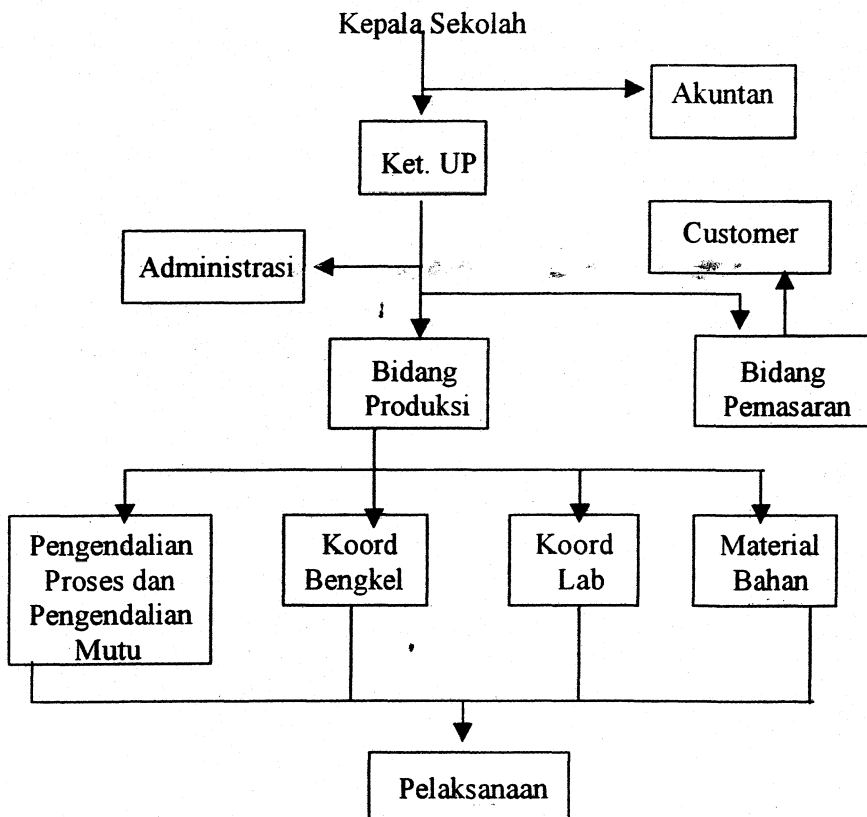
Selain itu, modal dasar yang berupa (1) sumber daya manusia internal yang bersumber dari sekolah yang bersangkutan, bisa diupayakan dengan inventarisasi dan rekrutmen baik dengan formal maupun non formal; (2) sumber daya manusia ahli yang bersumber dari sekolah yang bersangkutan, DUDI, institusi pasangan, alumni atau masyarakat, bisa diupayakan melalui kerjasama secara temporer; (3) ketersediaan laboratorium, bengkel, mesin-mesin, alat-alat yang bersumber dari sekolah yang bersangkutan. DUDI, institusi pasangan dapat diupayakan melalui kerjasama; (4) biaya yang bersumber dari DIP, koperasi, saham guru/karyawan, kontrak kerja, pinjaman bank dan hasil praktek siswa, harus diprogramkan pada awal/akhir tahun, sebagai jaminan dan merencanakan hasil praktek/produk yang *marketable*; dan (5) pemasaran yang bersumber dari sekolah yang bersangkutan, tenaga khusus, alumni masyarakat, DUDI, industri, dapat dialokasikan untuk promosi keberadaan UP pada tahun ajaran baru.

Selain itu, perlu diorientasikan ke arah organisasi perusahaan sebagai pelaku kegiatan bisnis yang dikelola secara profesional dengan melibatkan seluruh sumber daya baik internal maupun eksternal. Melihat dari pemikiran tersebut di atas maka UP harus mempunyai beberapa faktor pendukung dalam menyusun struktur organisasi antara lain: (1) dasar hukum yang mengikat pengakuan; (2) pengelolaan secara profesional meliputi organisasi dan manajemen independen sebagai unit usaha yang simple, efektif, dan tidak kaku; sinergi dengan tenaga kerja memiliki keahlian untuk membentuk kegiatan yang mengarah kepada kualitas/ mutu dan wawasan *interpreuner*.

Lain halnya dengan keterkaitan antara organisasi UP dengan organisasi sekolah, perlu ditegaskan bahwa uraian tugas dan fungsi Organisasi harus tergambar secara jelas dan ada keterkaitan dalam

kegiatan UP, termasuk dengan kegiatan proses belajar mengajar yang mendukung terlaksananya praktek industri.

Gambar berikut adalah ilustrasi model organisasi UP di Sekolah Menengah Kejuruan yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Organisasi Unit Produksi SMK

Sesuai dengan gambar di atas, Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan sekolah sekaligus terhadap kegiatan

UP yang dibantu oleh akuntan atau badan pengawas dari sekolah. Pelaksanaan operasional dijalankan oleh ketua UP dibantu oleh tenaga administrasi dari sekolah. Ketua bertugas mengelola secara operasional bidang produksi dan bidang pemasaran yang diambil dari sekolah atau dari luar sekolah, baik itu guru, tenaga khusus atau luar sekolah.

Peran lain adalah dalam bidang pemasaran yang akan mempromosikan dan memasarkan produk-produk kepada pemakai/pelanggan, ditambah bidang produksi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan usaha produksi (barang atau jasa) yang dibantu oleh koordinator-koordinator bengkel/lab untuk melaksanakan produksi. Dalam proses produksi koordinator yang bersangkutan bekerja sama dengan bidang pengendalian proses dan pengendalian mutu sekaligus melaksanakan pengendalian bahan. Apabila proses pelaksanaan barang/jasa telah selesai dan mutu telah sesuai dengan yang dikehendaki, maka hasilnya diserahkan kepada bagian pemasaran dan selanjutnya barang/ jasa ini akan dipasarkan/ diserahkan kepada *Customer*.

Adapun alur pelaksanaan produksi diusahakan untuk tidak dihadapkan pada birokrasi yang membingungkan, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan. Sifat alur pelaksanaan produksi hendaknya dirancang (1) penanggung-jawab harus selalu siap melayani; (2) pendelegasian wewenang harus jelas; (3) perangkat administrasi harus lengkap; (4) penanganan harus oleh ahlinya; dan (5) pemantauan harga, waktu dan jaminan semua informasi ini harus bisa ditentukan dengan cepat dan jelas.

IMPLEMENTASI UNIT PRODUKSI

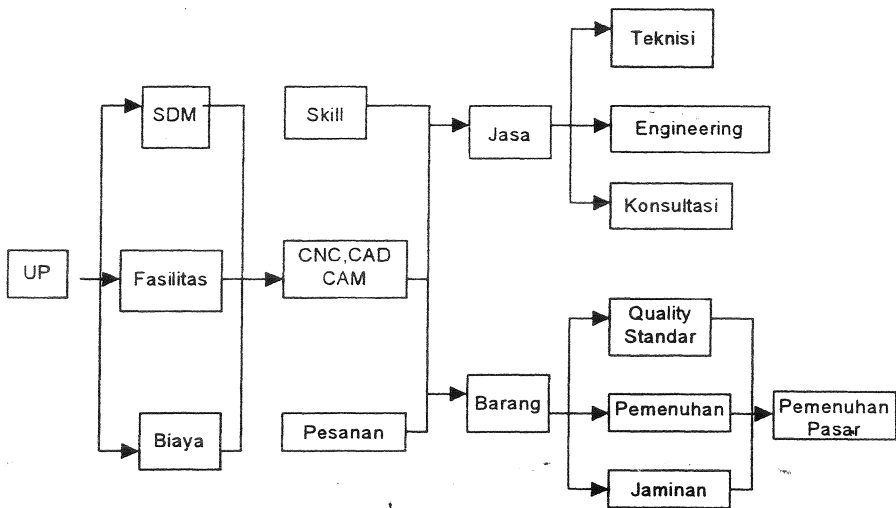
Untuk melaksanakan UP diusahakan memiliki badan hukum, disamping dikaji kelayakan UP baik terhadap (1) penentuan bidang usaha; maupun (2) lingkup usaha, yang disesuaikan dengan modal, kemampuan, kebutuhan mutu akan hasil produksi, agar diperoleh transaksi serta kemudahan atau fasilitas usaha.

Faktor-faktor yang terdiri atas sumber manusia, fasilitas dan biaya merupakan modal dasar yang harus dikelola sehingga dapat ditentukan (1) kegiatan usaha yang paling memungkinkan bentuk produksi barang, jasa ataupun barang dan jasa; (2) kegiatan usaha selalu berpedoman kepada kemampuan produksi, mutu, pelayanan, serta jaminan yang bisa dipakai; dan (3) kegiatan unit usaha harus mampu memproduksi sejajar dengan industri. Untuk mencapai hal tersebut perlu dihitung, direncanakan, dan diimplementasikan sehingga diperoleh bengkel UP yang khusus dan sederhana tetapi efektif.

Pelayanan yang dilakukan oleh UP meliputi kegiatan pelayanan produksi, jasa, maupun produksi dan jasa. Kegiatan pelayanan atau pembuatan barang dilakukan atas dasar pesanan atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan ataupun pembuatan barang-barang lain yang sesuai dengan kondisi permintaan pelanggan dan pasar. Barang-barang yang dihasilkan baik dari segi bentuk, jenis bahan, konstruksi maupun harga jualnya, diharapkan mampu menjamin kepuasan pelanggan atau memenuhi kebutuhan pasar. Sedang kegiatan dalam bidang jasa yang berupa pelatihan, konsultasi, pemakaian fasilitas, perbaikan yang dilakukan oleh sumber daya manusia baik oleh tenaga teknis maupun tenaga ahli yang memiliki keterampilan atau kemampuan yang memadai.

Berbeda halnya dengan pengaturan distribusi keuangan harus berdasarkan rencana anggaran yang meliputi: pembagian keuntungan tahunan, bonus pelaksana produksi, penambahan modal, kesejahteraan warga sekolah/jurusan, dana pendidikan, dana sosial/ kemasyarakatan dan asuransi. Besar persentase keuntungan tiap pos dinegosiasikan dengan komisariss dan ketua UP dengan melibatkan pemegang saham untuk dipertanggung jawabkan pada akhir program.

Berikut ini adalah penjelasan proses produksi sebuah UP, yang dapat dijadikan inspirasi untuk dikembangkan atau disederhanakan sesuai dengan keperluan setempat.



Gambar 2. Diagram alir Proses Pelaksanaan Produksi UP SMK

Pengembangan UP diarahkan untuk memenuhi persyaratan sebagai institusi pasangan dalam praktek lapangan/praktek industri, dan harus dimekarkan keberadaannya, misalnya dengan melakukan *feasibility study* (studi kelayakan) dan analisis SWOT yaitu *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*, yang diterjemahkan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Abdulah, 2000: 4). Analisis ini mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki UP berupa kuantitas dan kualitas sumber daya, sedangkan analisis masa datang mengacu pada peluang yang mungkin didapatkan dan tantangan yang mungkin dihadapi yang dapat mempengaruhi perkembangan unit di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya kadang timbul perbedaan antara apa yang sedang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka kesenjangan ini harus diatasi

dengan memaksimalkan kekuatan sumber daya yang ada dengan memperhatikan kreatifitas, kemungkinan yang akan terjadi, solusi yang inovatif dan alternatif yang mungkin terjadi. Misalnya dari analisis kebutuhan pasar yang selalu berubah, produksi berdasarkan mutu, bersamaan dengan daya beli pasar yang masih lemah, standar mutu produk tidak ada, sehingga setiap orang mampu menyadap mutu produk tanpa memandang perlu adanya izin dari pemilik. Untuk mengatasi hal tersebut harus ada inovasi produksi selaras dengan perubahan teknologi dan pengetahuan yang lebih luas tentang pasar yang akan dilayani, dan bilaperlu melakukan *merger* produk dengan perusahaan lain.

Setelah memperoleh beberapa pendekatan, selanjutnya ditentukan yang paling mungkin dengan memperhitungkan *Cost Effective* dan *Cost Benefit*. Berdasarkan hasil-hasil studi kelayakan dan analisis SWOT tersebut kemudian baru dapat dilakukan langkah-langkah pengembangannya UP antara lain (1) penentuan dasar hukum untuk pijakan; (2) pembentukan badan hukum; (3) pembentukan organisasi; (4) perencanaan administrasi dalam kegiatan; (5) penanganan kerja sama dengan pihak lain yang relevan; (6) perencanaan pemasaran; (7) perencanaan pengelolaan/ pemanfaatan hasil; (8) perencanaan pembiayaan, dan (9) perencanaan teknik operasionalisasi usaha (Pakpahan, 1997: 23).

Upaya mensinkronkan profil kemampuan yang dibutuhkan di lapangan/produksi dengan proses belajar-mengajar dengan mengacu pada kompetensi standar keahlian harus senantiasa dilakukan. Tahap kegiatan proses belajar-mengajar yang dimaksud sebagai berikut: menyusun perangkat materi bahan ajar untuk menunjang tujuan program diklat, menentukan jumlah jam pelajaran, mengidentifikasi jenis pekerjaan praktek dan mempersiapkan alat/bahan praktek di bengkel, menentukan model penyelenggaraan Diklat. Pada penentuan jumlah jam pelajaran, jenis pekerjaan praktek, jumlah daya tampung siswa,

agar UP tidak terganggu penyelenggaraan PBM dan diakhiri menyusun sistem penilaian dan monitoring. Pada suatu saat UP nantinya merupakan salah satu dukungan pokok menjalin kerja sama dengan institusi lain yang relevan. Namun demikian bila diamati secara nyata keadaan unit di SMK sekarang ini belum dapat beroperasi secara optimal, maka syogya perlu dimulai dengan kesungguhan.

Untuk dapat melaksanakan UP dengan sungguh-sungguh terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain (1) transparansi pengelolaan, agar menarik minat dan peran serta sumber daya yang enerjik agar mau ikut serta dalam kegiatan berusaha sehingga dengan adanya transparansi (khususnya dalam hal keuangan) akan muncul sikap jujur, penghargaan dan keteladanan; (2) keadilan dalam mendistribusi dan dalam proses kerja sangat didambakan oleh semua orang yang bermakna keadilan distribusi berarti keadilan dalam membagi keuntungan dan perhatian, sedangkan keadilan proses berarti adil dalam melaksanakan suatu aktivitas, pengakuan adanya eksistensi kemampuan kelompok dan perseorangan; (3) *power sharing* dengan indikasi adanya aspek dan praktek berbagi kekuasaan yang dibutuhkan di unit usaha bukan hanya memberi dan menunggu perintah, tapi juga kekuasaan untuk bersama-sama memutuskan kebijakan sehingga proses kerja akan dipercepat, karena ditangani oleh ahlinya, dan birokrasi akan lebih efektif serta pelanggan akan dilayani oleh orang yang berkompeten.; (4) *risk taking*, berarti berani mengambil risiko, walaupun pada ukuran keberhasilan menjadi tidak jelas dan tidak ada kesempatan untuk menghindar dari risiko tersebut, tetapi perlu disadari tingkat risiko ini sangat bervariasi. Pengelola usaha dapat mengintervensi untuk mengurangi bahkan mengerem laju pertumbuhan usaha, kalau memang belum memiliki persyaratan yang cukup untuk mengambil risiko yang lebih besar. Mengambil risiko bagi kalangan pegawai adalah suatu pilihan yang cukup sulit (Mustaghfirin, 2000: 4-5).

PENDEKATAN TATA CATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN

a. Penerimaan Keuangan

Agar semua penerimaan UP dapat selalu diketahui dan dikontrol seyogyanya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, ada bukti penerimaan yang telah disahkan oleh kepala UP, kemudian dicatat dalam pembukuan sesuai dengan penerimaan tersebut. Kedua, tanda bukti penerimaan uang tunai dari pelanggan/ konsumen, harus diketahui oleh manajer keuangan yang disahkan oleh kepala UP. Bendahara diijinkan menyimpan uang dalam Brankas maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, apabila UP sudah mandiri dan besar), apabila bendahara menerima uang tunai melebihi batas maksimum dan tidak ada rencana pembayaran harus segera disetor ke rekening bank yang telah ditetapkan dan bukti penyetoran harus diketahui secara tertulis oleh manajer keuangan. Selain itu, ketiga, penerimaan pajak, setiap pembelian barang harus dimungut pajak penjualan (PPn) dan apabila membayar honor/ uang lelah serta penerimaan barang harus dimungut juga Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, penerimaan uang berupa cek harus diketahui secara tertulis oleh manajer keuangan, aslinya di foto copy untuk arsip bukti penerimaan; dan kelima, penerimaan melalui transfer bank, bendahara diharapkan pro aktif meminta data rekening ke bank yang bersangkutan. Data rekening bank sangat penting untuk mengetahui dengan segera jumlah saldo bank pada suatu saat dan sebagai dasar perencanaan pembayaran serta sekaligus untuk mengetahui realisasi penagihan/pembayaran piutang dari para pelanggan/konsumen (VEDC, 2000: 4-6).

b. Pengeluaran Keuangan

Pengeluaran keuangan agar selalu dapat diketahui dan dikontrol diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, harus ada usulan rencana kebutuhan unit kerja yang bersangkutan yang diketahui

oleh koordinator produksi, setelah usulan kebutuhan memenuhi persyaratan, bendahara membayar dengan menggunakan tanda pembayaran yang ditanda tangani oleh penerima. Kedua, pengeluaran tunai, dimaksudkan pada saat permintaan pembayaran sudah ada bukti kwitansi/tanda penerimaan yang syah sesuai ketentuan. Bendahara dapat membayar apabila sudah mendapatkan persetujuan dari ketua Unit Poduksi. Ketiga, pembayaran biaya perjalanan yang besarnya sudah ditentukan dan diterima langsung oleh yang bersangkutan. Bendahara melaksanakan pembayaran sebagai pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari ketua UP. Keempat, pengeluaran setoran ke bank, setoran ke bank apabila kas tunai bendahara melebihi ketentuan maksimal uang tunai di brankas dan tidak ada rencana pengeluaran. Kelima, setoran pajak, semua penerimaan pajak (PPn dan PPh) dalam waktu 2 x 24 jam setelah penerimaan harus sudah disetor ke bank oleh bendahara dengan sepengetahuan ketua UP (VEDC Malang, 2000: 6- 10).

KESIMPULAN

Pengelolaan UP agar dapat memberi peluang dalam meningkatkan kualitas SMK, harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Peningkatan kualitas SMK di sekolah dapat dilihat dari tiga unsur yaitu secara edukatif, ekonomis maupun sosial. Manfaat edukatif antara lain dapat (1) meningkatkan pengetahuan siswa/guru; (2) meningkatkan keterampilan siswa/ guru; (3) meningkatkan kemampuan berorganisasi dalam bidang usaha; (4) melatih disiplin dan inisiatif; (5) melatih siswa memberikan jasa pelajaran, (6) menambah intensitas belajar siswa; (7) melaksanakan proses belajar mengajar dengan lebih baik dan (8) mengikuti perkembangan IPTEK. Manfaat ekonomis antara lain dapat (1) meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi siswa/guru/ dan karyawan; (2) meningkatkan keberanian mengambil sikap berusaha yang diperhitungkan secara ekonomis; (3) meningkatkan pendapatan

sekolah menuju ke arah mandiri, dan (4) dapat menambah sumber biaya perawatan fasilitas sekolah serta dapat menambah sumber biaya operasional pendidikan (praktek). Manfaat sosial antara lain dapat: (1) meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar warga sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan; (2) menumbuhkan semangat usaha bersama antar warga sekolah untuk meningkatkan hidupnya; (3) mensosialisasikan sekolah dengan masyarakat umum, dunia usaha, dan lembaga, baik mengenai operasional pendidikan, tamatan yang dihasilkan maupun produk usaha yang dihasilkan.

Untuk dapat melaksanakan UP dengan sungguh-sungguh terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain (1) transparansi pengelolaan; agar menarik minat dan peran serta sumber daya yang enerjik agar mau ikut serta dalam kegiatan berusaha.; (2) keadilan dalam mendistribusi dan dalam proses kerja yang sangat didambakan oleh semua orang. Keadilan proses berarti adil dalam melaksanakan suatu aktivitas, pengakuan adanya eksistensi kemampuan kelompok dan perseorangan; (3) *power sharing* dengan indikasi adanya aspek dan praktek berbagi kekuasaan. Kekuasaan yang dibutuhkan di unit usaha bukan hanya memberi dan menunggu perintah, tapi juga kekuasaan untuk bersama-sama memutuskan kebijakan.; (4) *risk taking*, berarti berani mengambil risiko, walaupun pada ukuran keberhasilan menjadi tidak jelas dan tidak ada kesempatan untuk menghindari dari risiko tersebut. Namun disadari tingkat risiko ini sangat bervariasi. Pengelola usaha dapat mengintervensi untuk mengurangi bahkan mengerem laju pertumbuhan usaha, kalau memang belum memiliki persyaratan yang cukup untuk mengambil risiko yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. (2000). *Pengembangan Sumber Daya manusia Bidang Manajemen Strategik*. Malang: VEDC

Depdikbud. (1996). *Kebijakan Direktorat Pendidikan menengah Kejuruan*. Jakarta: Depdikbud

Mustaghfirin. (2000). *Unit Projas*. Malang: VEDC.

Pakpahan. (1998). *Unit produksi Sekolah sebagai Alternatif Institusi Pasangan PSG*. Jakarta: Depdikbud.

Sukardi. (1991). *Profesionalisasi Tenaga Kependidikan Sekolah Kejuruan melalui Pengembangan Unit Produksi*. Yogyakarta: FPTK IKIP Yogyakarta

VEDC. (2000). *Organisasi dan Manajemen Projas*. Malang: VEDC Malang.